

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alex S, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2011,
- Arif Sumantri, KesehatanLingkungan, Jakarta: kencana pranada media grup, 2015,
- Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009,.
- Cecep Dani Sucipto, Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah, Jakarta: Goysen Publishing, 2009,
- Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan terjemahannya Semarang: CV. Asy Syifa, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat,
- E. Colink, Istilah Lingkungan Untuk Manajemen, Jakarta: Rineka Cipta. 1996,
- E. Damanhuri dan Tri Padmi, Probleme de Dechets Urban en Indonesie, TFE ENTPE Perancis, 1982, E. Damanhuri Editor: Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indonesia, Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung : Nusamedia, 2012
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya:hm.
- G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues. Singapore,Mc. Grw Hill 1993
- H.Salim HS dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jalarta Rajawali Pres.2013
- Inu Kecana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Refika Aditama, 2010
- Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010
- La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm.

- M. Gelbert, dkk., "Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan Wall Chart", Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, Malang: PPPGT/VEDC, 2002
- Maria Farida Indrati S . Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: kanisius, 2007,
- Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah. Lampung: Universitas Lampung Bandar. 2009,
- Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2006.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- RidwanHR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003,
- Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:
- Setya Retnami, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001
- SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2001,
- Sofiana Hanjani, "Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito", SKRIPSI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014,
- Sudradjat, Mengelola Sampah Kota, Bogor: Penebar Swadaya, 2006
- Sujatha, D.Sai. 2012. Water Sanitation And Health In Urban Areas. Discovery Pub House. New Delhi.
- Tchobanoglous, Integrated Solid Waste Management. Mc. Grw Hill: Kogakusha, 1993.

## **B. Jurnal**

- Lukman Hakim, Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan, Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02, Juli-Desember 2016,

### **C. Internet**

Buku, Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas  
<https://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>. Dikutip 27 juni 2022 16.13

Mero, Indonesia Darurat Sampah, hlm 1 <https://pelantar.id/selayang-pandang/tahun-2019-indonesia-darurat-sampah/> diakses 13 Februari 2020, Pukul 10:13 WIB

[www.infomasi ahli.com/24/11/2017/Pengertian Provinsi dan Kabupaten](http://www.infomasi ahli.com/24/11/2017/PengertianProvinsiDanKabupaten)

### **D. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Pasal I ayat (7).

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat(3)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah